

## KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN PENDATAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU

*Suci Rahmadhani, Muammar Alkadafi*

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> <i>Performance Village Government Sustainable Development Goals (SDGs)</i></p>	<p><i>This research was conducted at the Rimba Beringin Village Office, Tapung Hulu District, Kampar Regency. The purpose of this study was to find out how the performance of the Village Government and the inhibiting factors of the Village Government in carrying out data collection on Sustainable Development Goals (SDGs) for Rimba Beringin Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency. This type of research using qualitative methods is descriptive. The technique used in data collection is a literature study by reviewing books, journals and other written works. S field study with interviews, documentation, and observation. Based on the research results, it is known that the Village Government's performance in terms of productivity is not good because it has not carried out the tasks that have been given in accordance with the specified time limit. Responsibilities have not been maximally carried out so that the achievement of the SDGs score inputted has not been perfect. In addition, the inhibiting factors such as organizational resources are still below average and the element of community participation is still very low. So it can be concluded that the performance of the Village Government in carrying out Village SDGs data collection is not good because it has not run as it should.</i></p>
Info Artikel	SARI PATI
<p><b>Kata Kunci:</b> <i>Kinerja Pemerintah Desa Sustainable Development Goals (SDGs)</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: <a href="mailto:suciiarahmadhani20@gmail.com">suciiarahmadhani20@gmail.com</a></p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rimba BeringinKecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dengan penelaahan buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. Sstudi lapangan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam hal produktivitas belum baik dikarenakan belum melakukan tugas yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Responsibilitas belum maksimal dilakukan sehingga membuat pencapaian skor SDGs belum sempurna. Selain itu faktor penghambat seperti sumber daya organisasi dan unsur partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Sehigga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan SDGs Desa belum baik karena belum berjalan sebagaimana semestinya.</p>

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini fokus pembangunan yang dilakukan Indonesia telah bergeser dari kota ke desa yang mana dahulunya desa hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi sekarang sudah menjadi subjek pembangunan yang turut ikut menjadi bagian dari proses memajukan negara (Paais, 2021, p. 78). Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi role model di berbagai negara adalah pembangunan berkelanjutan. Dalam sidang umum PBB yang ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005, dilakukan evaluasi 5 tahun pelaksanaan MDGs. Dalam evaluasi tersebut dikatakan bahwa 50 negara gagal mencapai paling sedikit satu target MDGs. Sedangkan 65 negara lainnya berisiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Desember 2015 menjadi titik terakhir pengimplementasian Milenium Development Goals (MDGs) di seluruh negara termasuk Indonesia. Hingga tahun terakhir pelaksanaan MDGs ini, Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Tentu, capaian tersebut mengabarkan terjadinya peningkatan kualitas dan taraf hidup bagi rakyat Indonesia (Santoso, 2019, p. 6).

Prestasi capaian MDGs yang dicapai Indonesia harus di syukuri, dengan tetap terus melakukan upaya-upaya sistematis untuk terus meningkatkan kualitas hidup serta taraf hidup rakyat Indonesia. Secara global, berakhirnya MDGs menjadi titik awal negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan platform baru pembangunan dunia sebagai tindak lanjut dan keberlangsungan MDGs (Nindiani et al., 2021, p. 7). Tepat pada 2 Agustus 2015, bertempat di Markas PBB, New York, sebanyak 193 negara. Secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan global baru yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Pada bulan berikutnya, pada tanggal 25-27 September 2015, di tempat yang sama, perwakilan 193 negara anggota PBB menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit*. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dan mengesahkan sebuah dokumen yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target, yang saling terikat, mempengaruhi, inklusif, dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun yang terlewatkan (*no one left behind*), dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030 (Khalil & Aras, 2018, p. 81).

SDGs merupakan komitmen masyarakat internasional, tonggak baru pembangunan negara-negara, meneruskan Tujuan Pembangunan MDGs, untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sebagai sebuah agenda lanjutan dari MDGs, SDGs mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kualitatif maupun secara kuantitatif. Melibatkan partisipasi masyarakat bukan dari golongan elit pemerintahan desa saja (Rudiadi et al., 2021), serta melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah, seperti lembaga swadaya pemerintah, universitas/ akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok kepentingan lainnya (Iskandar, 2020, p. 11). Pada posisi inilah SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Yaitu membangun desa dengan substansi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang Pelokalan SDGs pada masing-masing desa menjadi maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemusatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian arahan dari Presiden Jokowi Widodo pada 22 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa : 1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah; 2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus (Syaiful et al., 2019, p. 296). Hal ini

didukung dengan dikeluarkannya Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; c. adaptasi kebiasaan baru Desa”.

Dari pernyataan Permendes PD TT diatas dapat dinyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 harus mengarah kepada program SDGs Desa. Tujuan SDGs di atas menempati posisi dampak pembangunan yang sangat diharapkan. Desa Rimba Beringin yang merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Riau, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang mana IDM (Indeks Desa Membangun) nya telah berstatus sebagai Desa berkembang atau Desa madya (Jenderal et al., 2021, p. 5) merupakan salah satu desa yang turut ikut serta dalam menjalankan SDGs/ TPB Desa.

SDGs Desa di mulai pada tahun 2021 bulan Maret. Untuk dapat mewujudkan SDGs Desa tersebut di mulai dengan berbagai alur yang telah ditentukan yang diawali dengan pendataan yang dilakukan di Desa terkait keseluruhan masyarakat desa, keadaan desa, pemerintahannya dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Rimba Beringin belum menyesuaikan perencanaan kerja mereka terutama pada bidang pembangunan dengan 18 tujuan SDGs Desa. Kemudian masyarakat mengakui bahwa memang ada mengisi kuisisioner pendataan yang dibagikan oleh Pemerintah Desa dan Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa tetapi banyak yang mengisi secara asal-asalan, hal ini terjadi karena ketidakpahaman mengenai SDGs, seberapa penting nya perwujudan SDGs bagi kehidupan masyarakat desa. Kemudian waktu yang terlalu singkat yang diberikan untuk mengisinya kuisisioner yang diberikan dengan jumlah yang harus diisi banyak mulai dari tingkat kepala keluarga hingga perindividu masyarakat tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan SDGs Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat dalam melaksanakan pendataan SDGs Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu.

#### METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi suatu gejala atau fenomena yang ada. Lalu dengan pendekatan ini data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, foto, yang didapatkan ketika turun ke lapangan (Samsu, 2017, p. 63).

Penelitian kualitatif ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat, dengan metode kualitatif mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Metode ini diharapkan bagi pembaca dapat membaca tulisan ini seolah-olah terlibat didalamnya dan dapat mengikuti alur cerita seperti berada pada lokasi yang sesungguhnya. (Wekke, 2019, p. 34). Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk di lakukannya suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Lokasi ini di pilih oleh penulis untuk melakukan

penelitian karena ingin melihat kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam melaksanakan pendataan (Sustainable Development Goals) SDGs Desa. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2021 hingga Februari 2022.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, sehingga menggunakan teori Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing / verification* (Sugiyono, 2019, p. 321).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Produktivitas

Agar kita dapat menilai baik atau buruknya kinerja organisasi dalam menjalankan pekerjaannya, maka produktivitas menjadi salah satu konsep dalam penilaian kinerja. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Menurut Selim dan Woodward dalam buku (Sinambela & Sinambela, 2019, p. 185) efisiensi adalah hal yang menunjukkan perbandingan biaya dengan hasil yang dicapai, sedangkan efektivitas adalah hal yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Agus Dwiyanto menyatakan bahwa produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Input yang diukur seperti tenaga kerja, materi atau modal, sedangkan output berupa hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan dan pemberian pelayanan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa terkait produktivitas maka akan dijabarkan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

#### Input Kinerja

Organisasi tidak dapat menciptakan budaya berorientasi kinerja apabila sebagian besar tenaga kerja tidak mempunyai komitmen dalam mencapai produktivitas. Adapun masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik dapat dinilai dari berbagai macam ukuran seperti sumber daya manusia, materi atau modal. Terkait sumber daya manusia di Kantor Desa Rimba Beringin, kualitas kerja Pemerintah Desa dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang mereka selesaikan, serta pelatihan yang mereka ikuti dalam mewujudkan SDGs Desa. Dalam melaksanakan pendataan SDGs Desa ini Pokja Relawan Pendataan Desa serta Pemerintah Desa input yang dilakukan adalah dengan melakukan pembekalan terlebih dahulu, yaitu pengenalan SDGs Desa kemudian tugas dan fungsi yang harus dilakukan, agar ketika melaksanakan tugas padamasing-masing pribadi tidak bingung dan mengerti apa yang harus dilakukan.

Terkait pelatihan yang dilakukan semua Pokja Relawan Pendataan Desa beserta Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi dan pembekalan terkait SDGs Desa. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal ini seharusnya Pemerintah Desa atau Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendataan untuk masyarakat bukan hanya memberikan kuisioner dan menjelaskan tata caranya saja. Melainkan diberikan informasi dasar SDGs Desa tersebut, betapa pentingnya arti dari pendataan untuk mewujudkan SDGs Desa, sehingga apabila masyarakat sudah paham dan mengerti akan hal tersebut maka mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pengimplementasian semua tujuan SDGs Desa.

Selanjutnya jika ditinjau dari dana yang tersedia yang dapat digunakan untuk melaksanakan pendataan SDGs Desa yaitu dari dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pendanaan

yang digunakan untuk mewujudkan SDGs Desa Rimba Beringin sudah mencukupi dan bisa dikatakan baik. Dengan jumlah sebesar Rp. 639.440.019 telah digunakan untuk pelaksanaan SDGs Desa termasuk didalamnya semua rangkaian mulai dari Musdes (Musyawarah Desa) untuk pembentukan Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa, sosialisasi dan pembekalan, pembagian kuisisioner sesuai dengan yang dibutuhkan, hingga Musdes penetapan hasil penetapan pendataan SDGs Desa hal tersebut sudah mencakup didalamnya. Tak lupa pula dana untuk honor para relawan dan yang terkait didalamnya sesuai dengan kewenangan desa dan musyawarah desa, sudah mencukupi. Karena pendanaan adalah sumber awal untuk kelancaran kegiatan yang akan dilakukan, apalagi program SDGs Desa ini baru diwujudkan sampai ketahap pendataan saja belum kepada pengimplementasiannya jadi belum terlalu membutuhkan banyak biaya dan dengan dana yang ada bisa mencukupi.

### Output Kinerja

Adapun yang dimaksud dengan output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai baik berupa fisik maupun nonfisik. Atau biasa diartikan juga sebagai keluaran, hasil pekerjaan yang dilakukan. Pada penelitian ini akan mengukur output kinerja dari Pemerintah Desa Rimba Beringin dengan melihat hasil dari pendataan SDGs Desa yang dilakukan. Jika dilihat dari hasil pembagian kuisisioner yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan PokjaRelawan Pendataan Desa didapatkan hasil bahwa Desa Rimba Beringin dengan IDM Desa berstatus sebagai Desa berkembang atau Desa madya yaitu desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907. (Jenderal et al. 2021). Memiliki luas wilayah 61, 96 km<sup>2</sup> dengan persentase 1,69%. terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Suka Makmur, Dusun Suka Harja , Dusun Suka Mulya , Dusun Suka Damai, terdiri dari 11 (sebelas) RW dan 32 (tiga puluh dua) RT , jumlah Kepala Keluarga 1.252 KK dengan jumlah Penduduk 4. 505 Jiwa dengan rincian laki-laki : 2.248, perempuan : 2.257. Berikut pada penelitian ini akan memaparkan hasil pendataan yang telah dilakukan dalam bentuk tabel untuk lebih jelasnya.

**Tabel 1. Hasil Pendataan Kuisisioner SDGs Desa Rimba Beringin**

No	Indikator Goals	Sub Indikator	Nilai
1	Desa Tanpa kemiskinan	Tingkat kemiskinan mencapai 0%	55,94
		Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	65,17
		Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	11,23
		Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1,61
		Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	4,49
		Individu miskin mendapat layanan kesehatan	83,33
		Orang miskin mendapat pendidikan SD	96,72
		Orang miskin mendapat pendidikan SMP	62,5
		Orang miskin mendapat pendidikan SMA	32,14
		Orang miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	0,46
		Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/Non-PLN)	100
		Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak	92,13
		Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak subjektif	96,63
		Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak subjektif	100
		Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	T/A
		Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100

2	Desa Tanpa Kelaparan	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0
		Ada pertanian kawasan pangan berkelanjutan	0
3	Desa Sehat dan Sejahtera	BPJS kesehatan mencapai 100% penduduk	7,82
		Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	13,79
		Persentase pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan dan penggunaan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	T/A
		Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99,7
		Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani rehabilitasi sosial	T/A
4	Pendidikan Desa Kualitas	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	100
		Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	100
		Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	100
		Akses anak ke pesantren mencapai 100%	100
		APK SD/MI mencapai 100%	100
		APK SMP/MTs mencapai 100%	76,72
		APK SMA/MA mencapai 100%	34,65
		APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	73,03
		APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	33,62
		APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	15,84
		Rata-rata sekolah penduduk > 20 tahun mencapai 12 tahun	76,00
Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	57,79		
No	Indikator Goals	Sub Indikator	Nilai
5	Keterlibatan Perempuan Desa	Tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan	100
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%	
		Median usia kawin pertama perempuan (Pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	100
		APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	34,65
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100%	70,45
		Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	97,52
		Keluarga dan industry yang dilayani air baku mencapai 100%	99,79
		Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah tinja mencapai 100%	0,62
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi > 1.200 kWh/kapita	99,59
		Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak 100%	100
		Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak < 50%	100
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Pekerja sektor formal minimal 51%	40,21
		Tingkat terbuka 0%	66,15
		Angkatan kerja baru yang mencapai 100%	1,65
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa	Jalan kondisi baik mencapai 100%	T/A
		Dermaga/ tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	T/A
		Industri yang mencapai 0%	T/A
		Koefisien gini desa di bawah 0,200	20,1

10	Desa Tanpa Kesenjangan	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100
		Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan mencapai 100%	17,51
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	Rumah mencapai 0%	98,55
		Pengamanan dilaksanakan di 100% RT	0
		Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel penggunaan modal transportasi umum > 50%	6,19
		Tersedia peringatan dini bencana	0
		Terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	30,58
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Tersedia unit pengolah sampah	0
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Penanganan/ pengelolaan mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	0
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	Perlindungan sumber daya laut	0
		Peningkatan penangkapan ikan secara wajar	0
		Terjadinya ilegal fishing	0
15	Desa Peduli Lingkungan	Luas lahan hutan rusak dan tahan kritis di hutan mencapai 0% pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi	0
No	Indikator Goals	Sub Indikator	Nilai
16	Desa Damai Berkeadilan	Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%	100
		Terselenggara gotong royong antar penduduk yang berbeda agama, ras, golongan	0,58
		Pekerja anak mencapai 0%	99,81
		Perdagangan manusia mencapai 0%	100
		Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	85,71
		Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100
		Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, rasa, dan golongan mencapai 100%	T/A
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga	0
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan membantu yang berdasarkan pada ajaran agama	6,56
		Budaya yang dilestarikan mencapai 100% lembaga adat aktif	0
		Penyelesaian masalah sosial melalui pendidikan budaya >50%	T/A

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2022

Dari tabel 1 diatas dapat terlihat bahwa masih banyak sub indikator yang penilaiannya belum mencapai 100 yang berarti belum terinput data di Desa Rimba Beringin secara keseluruhan. Di sisi lain banyak pula yang masih berpenilaian T/A (Tidak Ada) yang memang belum diinput datanya sama sekali baik oleh Pemerintah Desa ataupun Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa. Sedangkan jika dilihat dari grafik terkait hasil dari pendataan yang dilakukan Desa Rimba Beringin sebagaimana dibawah ini.

**Gambar 1** Capaian Skor SDGs Desa Rimba Beringin



Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 18 tujuan SDGs Desa dengan capaianskor tertinggi yaitu 100 adalah goals 7 (desa bersinergi bersih dan terbarukan) selanjutnya disusul oleh skor 81 yaitu goals 16 (desa damai berkeadilan), disusul lagi oleh skor 79 yaitu goals 5 (keterlibatan perempuan desa), skor 68 yaitu goals 4 (pendidikan desa berkualitas), skor 58 yaitu goals 1 (desa tanpa kemiskinan), skor 52 yaitu goals 6 (desa layak air bersih dan sanitasi), skor 43 yaitu 10 (desa tanpa kesenjangan), skor 40 goals (desa sehat dan sejahtera), skor 32 yaitu goals 3 (desa sehat dan sejahtera), skor 28 yaitu goals 8 (pertumbuhan ekonomi desa merata), skor 21 yaitu goals 11 (kawasan pemukiman desa aman dan nyaman), skor 2 yaitu goals 18 (kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adptif), adapun dengan capaian skor 0 adalah goals 9 (infrstruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan), goals 12 (komsumsi dan produksi desa sadar lingkungan), goals 13 (desa tanggap perubahan iklim), goals 14 (desa peduli lingkungan laut), goals 15 (desa peduli lingkungan darat), goals 17 (kemitraan untuk pembangunan desa).

Untuk melihat mengapa penginputan data belum selesai dilakukan padahal seharusnya sebagaimana yang dijelaskan di ([www.sdgsdesa.kemendes.go.id](http://www.sdgsdesa.kemendes.go.id)) jangka waktu pelaksanaan pemuktahiran data SDGs Desa 2021 dilaksanakan tanggal 1 maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 dengan harapan bahwa bulan Juni tahun 2021 sudah bisa menjadikan hasil pendataan untuk acuan RKPDes tahun 2021. Tetapi pada kenyataannya masih banyak desa yang belum menyelesaikan penginputan data tersebut. Kementrian Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI memperpanjang pendataan SDGs desa hingga bulan Agustus tahun 2021. Perpanjangan dimaksudkan agar petugas pendata lebih maksimal dalam melakukan penginputan.

Akan tetapi dalam hal ini Desa Rimba Beringin masih belum menyelesaikan penginputan data SDGs ke *dashboar* tersebut, sehingga masih dilakukan musyawarah desa pembentukan RKPDes masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa hasil dari pendataan SDGs Desa terdapat banyak kendala dalam penginputan yang terkesan lama dan SDM yang tidak paham akan teknologi dengan jumlah 32 RT dan 11 RW yang harus diinput sedangkan yang menginput data hanya sekitar 20 orang saja. Maka dari permasalahan ini diperlukan peningkatan kualitas SDM Pemerintah Desa beserta Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa agar bisa menyelesaikan sesuai dengan yang dialurkan untuk mewujudkan SDGs Desa tersebut.

## 2. Kualitas Layanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga defenisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan



penyampaiannya dalam mengimbangi harapan masyarakat (Hayat, 2019, p. 12). Penilaian terhadap kualitas layanan terlihat dari pelayanan publik yang diberikan beserta keselarasan tujuan SDGs Desa keadaan Desa Rimba Beringin.

### **Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Diperkuat pula dalam ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur (Hayat, 2019, p. 2).

Dari uraian UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima layanan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung dari bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan diberikan (Sugiman, 2018, p. 12). Begitu pula dengan Pemerintahan Desa Rimba Beringin dimana kinerja yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Seperti organisasi publik, Pemerintahan Desa adalah ujung tombak pemberi layanan karena berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di desa tersebut. Adapun ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa serta administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadi dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan telah menunjukkan kinerja Pemerintahan Desa dalam pelayanan publik sudah cukup baik, masyarakat merasa bahwa merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Rimba Beringin. Namun perlu peningkatan untuk mendapatkan hasil kepuasan yang maksimal dari masyarakat. Seperti dalam hal pelayanan barang, jasa agar masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Karena pelayanan yang baik akan menghasilkan kepuasan dari masyarakat atau pemanfaat ini menjadi prestasi bagi organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Kepuasan masyarakat terhadap organisasi pemberi layanan publik ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat serta mendapatkan penilaian yang bagus untuk organisasi publik tersebut.

### **Keselarasan Desa dengan Tujuan SDGs Desa**

Jika dilihat dari kualitas pelayanan Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam keselarasan dengan tujuan SDGs Desa masih banyak yang belum selaras hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih untuk dapat mewujudkannya, agar semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari SDGs Desa tersebut. Adapun yang sudah selaras dengan tujuan SDGs Desa Rimba Beringin seperti penjabaran dibawah ini.

#### **Tujuan 1 : Desa tanpa Kemiskinan**

Upaya yang dilakukan Desa Rimba Beringin dalam mewujudkan tujuan desa tanpa kemiskinan adalah memberikan berbagai bantuan baik dari Pemerintah Pusat yang di berikan melalui desa seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah 21 orang, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berjumlah 36 orang dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah 25

orang, ada pula program yang langsung diberikan langsung kepada pemerintah desa seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2021. Dengan melakukan berbagai penyaluran bantuan yang di berikan Pemerintah Pusat untuk desa, Pemerintah Desa Rimba Beringin berharap dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Rimba Beringin.

### **Tujuan 2 : Desa tanpa Kelaparan**

Dalam hal ini Pemerintah Desa Rimba Beringin untuk mewujudkan tujuan dari desa tanpa kelaparan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita telah mencapai 100% (yaitu 369 orang anak balita bergizi baik dari total anak balita 369 orang). Upaya desa Rimba Beringin dalam mencapai hal ini yaitu dengan melakukan posyandu pada balita pada setiap bulannya minggu kedua tepatnya hari Selasa dan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu hamil atau pemeriksaan khusus ibu hamil setiap bulannya pada minggu pertama setiap bulannya pada hari Rabu. Pemerintah Desa hanya melakukan tujuan desa tanpa kelaparan melalui posyandu untuk mencegah gizi buruk pada anak, penyuluhan untuk ibu hamil dan tidak ada lagi upaya lain yang dilakukan untuk lansia (lanjut usia) yang sangat dibutuhkan pemeriksaan secara berkala dan kiat-kiat untuk memelihara kesehatan atau hal yang lainnya. Kalau akses untuk mendapatkan bahan pangan masyarakat Desa Rimba Beringin bisa membeli di warung-warung terdekat untuk setiap harinya dikarenakan Desa yang tidak memiliki pasar dan harus ke desa sebelah sekali seminggu untuk mendapatkan bahan pangan, sandang dan sebagian.

### **Tujuan 3 : Desa Sehat dan Sejahtera**

Untuk melayani kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Rimba Beringin di bawah koordinasi Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelayanan Puskesmas pembantu (Pustu). Pustu melayani rawat jalan, penyuluhan kebidanan, imunisasi, dan aktivitas medis ringan lainnya. Dengan seorang bidan dan 1 buah tempat posyandu. Selain itu desa ini juga memiliki 1 mobil *ambulance* dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk membantu masyarakat desa jika kalau ada sewaktu-waktu ada yang sakit, bisa segera diantar ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Selain itu jika dilihat dari penduduk Desa Rimba Beringin yang sudah terdaftar dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sudah 2.112 orang ini berdasarkan pendataan SDGs Desa terbaru 2022. Desa Rimba Beringin sudah baik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan SDGs desa sehat dan sejahtera.

### **Tujuan 4 : Pendidikan Desa Berkualitas**

Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Untuk mewujudkan tujuan ini Desa Rimba Beringin telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan di mulai dari TK hingga SMK sudah ada tetapi untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) Desa Rimba Beringin tetapi lain halnya dengan pendidikan lainnya seperti universitas, pondok pesantren, SMA membutuhkan sarana untuk sampai ketujuan dikarenakan jarak tempuh yang lumayan jauh. Dapat dijabarkan yaitu TK ada 1 berstatus swasta, kemudian SD ada 1 berstatus negeri, lalu SMP 1 berstatus negeri dan SMK 1 berstatus negeri. Selanjutnya jika ditinjau dari pendidikan informal yang ada di Desa Rimba Beringin ada PDTA Raudatul Jannah yang posisinya disamping mesjid, lalu biasanya ada guru ngaji yang mengajar anak-anak di mesjid setelah selesai sholat magrib.

### **Tujuan 5 : Keterlibatan Perempuan Desa.**

Desa Rimba Beringin keselarasan dengan tujuan SDGs ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa yang memegang jabatan sebagai Kepala Desa yaitu Ibu Ety Ariani kemudian Sekretaris Desa juga berjenis kelamin perempuan yaitu Ibu

Mutmainnah. Dalam hal ini tidak ada diskriminasi, perempuan atau laki-laki bisa menjadi bagian dari lembaga Pemerintah. Selain itu dilihat dari segi organisasi lainnya yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Desa) yang mana organisasi ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

#### **Tujuan 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi**

Desa Rimba Beringin untuk mencapai hal tersebut telah memiliki PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang terletak di dusun Suka Harja. Dengan memiliki PAMSIMAS yang hanya terletak di satu dusun saja di Desa tersebut, hal itu diperlukan tambahan karena dengan 11 (Sebelas) RW dan 32 (Tiga Puluh Dua) RT dan lokasi yang lumayan jauh-jauh antar dusun dan tak semua yang bisa dijangkau oleh aliran PAM yang ada sekarang. Lalu tidak semua rumah masyarakat Desa Rimba Beringin memiliki mata air yang jernih dan bersih yang memang layak untuk dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan sanitasi yang Pemerintah Desa Rimba Beringin hanya melakukan berupa sosialisasi tentang kesehatan masyarakat dan penyemprotan berbagai penularan penyakit berbahaya untuk warga desa selalu sehat.

#### **Tujuan 7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan**

Energi merupakan penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, yang mendukung pembangunan manusia berkualitas. Dalam tujuan ini diharapkan desa memiliki akses terhadap energi terbarukan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diambil dari BPS pengguna listrik dengan PLN 1.131 orang sedangkan yang Non-PLN 215 orang dengan jumlah 1.346 orang. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi / pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari aki, generator, dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (yang tidak dikelola oleh PLN).

#### **Tujuan 8. : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata**

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Rimba Beringin dalam mencapai hal ini mempunyai 1 buah KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya UUO (Unit Usaha Otonom) Rimba Beringin. KUD membantu petani dalam pengadaan sarana produksi pertanian, permodalan dan menjamin pemasaran produksi pertanian yang penyelenggaraannya berdasarkan sistem demokrasi dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini dapat membantu perekonomian para petani untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak. Dengan adanya KUD memudahkan masyarakat untuk melakukan peminjaman keuangan berdasarkan kebutuhan, dan pengurusan yang mudah serta pelayanan yang diberikan baik dan membuat masyarakat nyaman dalam pengurusan tersebut. Namun disamping itu diperlukan peningkatan PADes dengan memajukan BUMDes dan bisa membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan.

#### **Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan**

Adapun di desa Rimba Beringin berdasarkan hasil observasi peneliti rata-rata masyarakat desa sudah mempunyai jamban sendiri atau WC (Water Closet) jadi tidak ada limbah yang mengganggu para masyarakat lainnya. Pengelolaan sampah rata-rata masyarakat desa hasil pendataan SDGs masih dengan cara di bakar, dikuburkan di dalam tanah atau bak sampah yang dibuat sendiri dan lainnya, karena di desa belum begitu tertata dibandingkan di kota dibangun TPS (Tempat Penampungan Sementara) dengan menggunakan jasa angkut, membayar iuran setiap bulannya agar

lebih terarah dan membuat lingkungan lebih bersih. Hal ini seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah desa dapat menciptakan desa bersih dan terbebas dari penyakit.

#### **Tujuan 16 : Desa Damai Berkeadilan**

Tujuan dari desa damai berkeadilan ini adalah tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, dan melestarikan budayagotong royong. Dalam hal ini Desa Rimba Beringin telah merealisasikan dalam wujud Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang dilakukan setiap malam dengan jadwal yang berbeda-beda kemudian, budaya gotong royong yang terus dilakukan setiap ada acara besar atau lainnya.

#### **Tujuan 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif**

Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Karena itulah, keberadaan kelembagaan desa harus diperkuat sehingga dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa. Dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang didapatkan bahwa dalam rangka budaya gotong royong masih mendarah daging dalam setiap diri masyarakat Desa Rimba Beringin tetapi kalau dalam pelestarian budaya belum ada, yang mana dalam hal ini apabila tidak dilestarikan bisa punah begitu saja dan tidak bisa di diturun termurunkan untuk masa mendatang.

### **3. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut (Sinambela & Sinambela, 2019, p. 178) responsivitas sebagai kemampuan untuk menyediakan sesuatu yang menjadi tuntutan masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat mengharapkan para aparatur pemerintah menjadi responsif dalam artian mau mendengarkan permintaan dan keperluan mereka. Untuk melihat kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam menyusun perencanaan dalam mewujudkan SDGs Desa. Sebagaimana dijelaskan di dalam (Shuida, 2016, p. 28). Pemerintah Desa menyusun RKP Des sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa paling lambat Juli setiap tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Des. Penyusunan RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris dan anggota yang meliputi: perangkat desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), unsur masyarakat dan lain sebagainya. Jumlah anggota tim penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan (Risna, 2018, p. 16).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam hal menyusun perencanaan untuk mewujudkan SDGs Desa sudah baik, dengan menyikapi aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui MUSREMBANGDes serta mengikutsertakan semua kalangan mulai dari Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, seperti guru ngaji, para bidang kesehatan, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dalam hal realisasi sesuai kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara baik. Dikarenakan pendanaan yang tidak memadai dan tidak adanya pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Dari pada itu diperlukan lagi peningkatan ekonomi melalui

BUMDes atau sebagainya untuk menambah PADes serta menjalin kerjasama dengan kemitraan untuk menunjang pendanaan.

#### 4. **Responsibilitas**

Menurut (Dwiyanto et al., 2006, p. 50) mengemukakan bahwa responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Fredrich dalam (Sinambela & Sinambela, 2019, p. 180) responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Organisasi publik dikatakan bertanggung jawab apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi yang tinggi. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kebijakan, organisasi publik harus memiliki standar tersendiri secara administratif atau teknis sehingga disebut juga sebagai pertanggungjawaban yang bersifat subjektif.

Konsep responsibilitas Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pendataan SDGs Desa. Adapun dengan merujuk pada Permendes PDPTT Nomor 21 tahun 2021 Pemerintah Desa dan Pokja Relawan Pendataan Desa ([www.sdgsdesa.kemendes.go.id](http://www.sdgsdesa.kemendes.go.id)) melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pembina: Kepala Desa  
Tugas Kepala Desa dalam hal mewujudkan SDGs desa yaitu :
  - Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat Kepala Desa
  - Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lainnya untuk proses pelaksanaan pemuktahiran data SDGs Desa
  - Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemuktahiran SDGs Desa
  - Melaksanakan musdes penetapan hasil pemuktahiran data SDGs Desa
2. Ketua: Sekretaris Desa dan Sekretaris: Kasi Pemerintahan  
Desa Tugas sekretaris desa dalam hal mewujudkan SDGs Desa yaitu:
  - Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
  - Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa
  - Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
  - Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus RT, serta lokasi RT untuk penugasan pendata dari warga desa
  - Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang ditemui dilapangan
  - Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuisisioner yang dihasilkanseluruh pendata
  - Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuisisioner SDGs Desa
  - Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mencekakhir hasil data SDGs Desa
3. Anggota: Unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakatdesa lainnya. Adapun tugas dari anggota dalm mewujudkan SDGs Desa yaitu:
  - Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa
  - Melakukan pemutakhiran data dengan kuisisioner yang sudah disediakan

- Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs
- Menjalinkan kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa dan relawan desa.

Sesuai dengan hasil observasi, data-data yang didapatkan serta hasil wawancara yang telah dilakukan untuk kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin sudah cukup baik dapat dilihat dari tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan terhadap mereka. Hal ini tak sampai disitu saja ditinjau dari sarana penunjang kelancaran kinerja aparatur Pemerintah Desa sudah baik. Dan pengawasan yang di lakukan untuk melihat kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin pun telah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai jabatan mereka telah bertanggung jawab dan menjalankan dengan baik tetapi untuk tahap pemutakhiran belum dilakukan oleh Pemerintah Desa dikarenakan belum selesai penginputan yang di input di *dashboar* Kemendesa tersebut. Didukung dengan sarana yang lengkap untuk menunjang kelancaran kinerja mereka seharusnya Pemerintah Desa Rimba Beringin bisa memaksimalkan lagi kinerja mereka untuk mendapatkan kinerja mereka untuk mewujudkan SDGs Desa tersebut.

## 5. Akuntabilitas

Dewasa ini akuntabilitas menjadi isu hangat yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik. Akuntabilitas harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik sebab organisasi publik bekerja untuk publik atau masyarakat sehingga masyarakat sudah seharusnya mengetahui bagaimana dan apa saja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Dalam (Setiawati & Farhani, 2019, p. 171) akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal tetapi juga bisa dilihat pada hal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Yang ingin dilihat dari indikator akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin adalah menyangkut musyawarah desa terkait pemutakhiran penetapan hasil pendataan SDGs Desa Rimba Beringin.

Dari hasil wawancara dan ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan akuntabilitas publik terkait mewujudkan SDGs Desa Rimba Beringin yang sekarang hanya sampai kepada tahap pendataan, Desa Rimba Beringin belum bisa dikategorikan baik karena sesuai arahan yang telah diberikan Kemendes bahwa hasil pendataan itu akan dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan RKPDes tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni atau paling lama September dalam wadah musyawarah desa. Sedangkan pada realitanya Pemerintah Desa Rimba Beringin belum menyelesaikan hal tersebut sehingga dikhawatirkan dalam perencanaan pembangunan RKPDes tahun 2022 tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena yang menjadi acuan untuk membentuk RKPDes tersebut belum selesai.

### Faktor-faktor yang Menghambat Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan SDGs Desa

#### 1. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi yaitu menyangkut manusia atau orang-orang yang bekerja didalam suatu organisasi. Di Desa Rimba Beringin Kepala Desa dan perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMP sampai dengan S1. Jumlah aparatur desa yang ada di Desa Rimba Beringin dari Kepala Desa sampai dengan Kepala Dusun adalah sebanyak 13 orang. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing aparatur desa yang ada di Desa Rimba Beringin tergolong rendah karena kebanyakan lulusan SMA. Kondisi tingkat pendidikan yang ada sekarang cukup menghambat perwujudan SDGs Desa di Desa Rimba Beringin, dikarenakan

informasi yang di berikan terkadang lambat dalam menjalankannya dan masih GAPTEK (Gagap Teknologi) yang mana dalam hal ini pengenalan terhadap teknologi sangat dibutuhkan.

Apalagi ketika penginputan data SDGs Desa yang terdiri dari 32 RT dan 11 RW yang hanya diinput oleh 3 orang saja hal ini akan lama karena ketidakpahaman para pemerintah desa dengan teknologi makanya seharusnya perlunya peningkatan ataupun pelatihan agar semua Pemerintah Desa tidak Gaptek karena di era 4.0 sudah eranya teknologi yang sudah menjadi tuntutan untuk organisasi publik paham akan hal demikian demi kelancaran kinerja mereka. Kemudian kegiatan pelatihan bagi aparatur desa di Desa Rimba Beringin dalam upaya mendukung perwujudan pencapaian SDGs Desa berupa pelatihan hanya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan namun dirasa masih kurang signifikan apalagi kalau dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia pemerintah desa.

## **2. Kemitraan untuk Mewujudkan SDGs Desa**

Pembiayaan adalah besaran dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan segala sesuatu dalam suatu organisasi publik, dengan pembiayaan yang mendukung suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Suatu organisasi akan lebih maju apabila ditunjang pembiayaan yang memadai. Untuk pembiayaan telah tersedia pembiayaan di Desa Rimba Beringin dan yang diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kegiatan 1 Milyar. Dan pembiayaan yang diberikan belum mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya Desa Rimba Beringin tidak ada menjalin kerjasama atau mitra yang membantu untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan tersebut. Sehingga dalam hal ini Desa Rimba Beringin hanya berfokus terhadap dana yang di dapat dari pemerintah tanpa ada mendapatkan dari yang lainnya. Ditambah lagi Desa Rimba Beringin belum ada PADes tambahan selain daripada yang diberikan seharusnya ada inovasi atau kelompok-kelompok di desa untuk menambah pendapatan desa dan bisa untuk kelancaran semua kegiatan di Desa.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan. Di Desa Rimba Beringin jika dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tingkat partisipasi yang sangat kurang hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai SDGs Desa sehingga dalam pengisian kuisisioner banyak yang mengisi secara asal-asalan serta hal inilah yang membuat data yang diisi tidak relevan dengan hasil yang diharapkan. Dalam permasalahan ini menjadi peran Pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi agar program SDGs desa bisa mencapai tepat sasaran. Karena untuk mewujudkan SDGs Desa tidak hanya dari Pemerintah Desa tetapi dengan mengikutsertakan masyarakat didalamnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar , maka pada bab ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a) Indikator produktivitas diartikan sebagai rasio antara input dan output dari Kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam mewujudkan SDGs Desa. Produktivitas yang dicapai dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dalam sisi input yaitu sumber daya manusia telah cukup baik dan dana yang dimiliki cukup untuk melaksanakan program SDGs Desa. Sedangkan dalam output kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin belum menyelesaikan penginputan pendataan sesuai dengan arahan Kementrian Desa. Dalam hal ini Pemerintah desa Rimba Beringin belum bisa dikatakan baik

karena belum produktif dalam melakukan tugasnya. b) Indikator kualitas layanan pada kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin ini dinilai berdasarkan dua sub-indikator yaitu pelayanan publik dan keselarasan tujuan SDGs Desa. Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Desa Rimba Beringin sudah memberikan kepuasan kepada masyarakat hal ini didapatkan berdasarkan wawancara bersama masyarakat sebagai penerima layanan publik. Lalu dalam hal keselarasan tujuan SDGs desa dengan yang telah ada di Desa Rimba Beringin tersebut 18 tujuan SDGs Desa 10 tujuan telah selaras dengan Desa Rimba Beringin. Dalam hal ini dapat dikatakan baik dalam kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat c) Indikator ketiga Responsivitas dari Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam menyusun perencanaan telah mengikutsertakan seluruh kalangan masyarakat agar semua aspirasi dapat disampaikan melalui forum formal. Sedangkan jika ditinjau dari mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa dinilai oleh masyarakat belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan belum tampaknya pembangunan yang signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan Pemerintah Desa menyatakan bahwa sebenarnya mereka mengetahui apa yang menjadi prioritas untuk pembangunan tetapi terkendala pendanaan yang tidak mencukupi untuk mewujudkan semua rencana kerja tersebut. d) Indikator keempat tanggungjawab dari kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin. Tanggungjawab diartikan sebagai kesesuaian tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Desa Rimba Beringin dalam mewujudkan SDGs Desa. Tanggungjawab dari kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin dikatakan cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Pemerintah Desa dan Ketua BPD sebagai pengawas kinerja Pemerintah Desa. Dalam hal tersebut tentang kesesuaian tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku hanya saja pada tahapan musyawarah desa dalam rangka pemutakhiran hasil pendataan SDGs Desa belum dapat dilakukan dikarenakan belum selesainya penginputan data SDGs ke dashboard yang telah ditentukan. e) Indikator kelima akuntabilitas dari kinerja Pemerintah Desa Rimba Beringin. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban dari hasil kerja yang telah dilakukan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Rimba Beringin belum baik karena dalam pekerjaan yang dilakukan belum produktif sehingga belum bisa melakukan pertanggungjawaban melalui musyawarah untuk disampaikan dipublik sebagai bentuk telah melakukan kerja.

Selanjutnya jika ditinjau dari faktor penghambat dalam mewujudkan SDGs Desa Rimba Beringin yaitu: 1) Sumber daya organisasi yang masih belum memadai terutama dalam teknologi. Dalam melaksanakan SDGs tahapan yang pertama dengan melakukan pendataan masih banyak Pemerintah Desa yang tidak paham untuk menginput data tersebut ke dashboard. Sehingga jangka waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Desa Rimba Beringin belum menyelesaikan penginputan pendataan tersebut. Sehingga dalam hal ini dinilai tidak produktif. 2) Kemitraan untuk pembangunan desa yang tidak ada, hal ini sangat penting karena kalau hanya berdasarkan dana yang diberikan Pemerintah Pusat saja yang digunakan maka tidak akan cukup dengan rencana kerja yang banyak. Lalu peningkatan PADes ditingkatkan dengan menghidupkan kembali BUMDes, pertanian, peternakan dan lain sebagainya agar bisa secara bertahap pembangunan di desa tersebut terwujud. 3) Partisipasi masyarakat. Ketidakhahaman masyarakat yang tak mengerti mengenai SDGs Desa membuat kesulitan untuk mencapai sasaran tujuan SDGs Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta :Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Hayat. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Raja Grafindo Persada.



- Indrasari, Meithiana. 2017. *Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan)*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Iskandar, Abdul Halim. 2020. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Santoso, Djonet. 2019. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Shuida, Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

### Jurnal

- Afifuddin, Mohammad. 2021. *Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa Di Pulau Madura: Studi Terhadap Desa Dasok dan Desa Alang-Alang*, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 02 (01): 470-483.
- Alfa, Akbar. 2019. *Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun*, Jurnal Kebijakan pembangunan Derah, 05 (02): 2016-2021.
- Apriani, R., & Sakban, A. (2019). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2) : 152-166.
- Asmawatiy, Cici. 2018. *Kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa (Studi perbandingan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, 02 (03): 187-224.
- Djafri, Novianty, Apriyanto A.J Pauweni, dan Syamsu Qamar Badu. 2021. *Peningkatan Pendapatan Perekonomian Kelompok UMKM Melalui Pemanfaatan, peran dan Rencana Aksi Pelaksanaan SDGs Desa*, Jurnal Solusi Masyarakat, 10 (03): 456- 462.
- Lingarwati, Tunjung, Agus Haryanto, dan Arief Bakhtiar Darmawan. 2021. *Implementasi SDGs Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas*, Jurnal Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, 12 (14): 361-368.
- Nawir, Adi, Syamsuddin, dan Jusniaty. 2022. *Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali dalam mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 02 (01): 1-18.
- Paais, Loris Sara. 2021. *Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Pembangunan Desa (Diversity of Relligious, Ethnicities, Languages, and Village Development)*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, 05 (02): 77-90.
- Risna. 2018. *Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 05 (01): 1-10.
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). *Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa*. Jurnal El-Riyasah, 12(1), 44-58.

- Santosa. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat berkonsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah mada di Masa Pandemi Covid- 19*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 11 (19): 317-324.
- Setiawan, Budi, dan Ahmad Farhani. 2019. *Analisis Kinerja pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*, Jurnal Pemikiran dan Pemikiran Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, 3 (2): 162-175.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, 07 (01): 82-95.
- Surya, Zulphi Roberta. 2019. *Analisa Keselarasan SDgs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu*, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 05 (02): 79-84.
- Sutrisna, I Wayan. 2021. *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*, Jurnal Cakrawarti, 04 (01): 1-10.
- Syaiful, Apip Supriatna, dan Eka Apriana. 2019. *Desa Maju Dukung SDGs*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 03 (03) : 296-300.

### **Perundang-Undangan**

- Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Website**

- [www.infopublik.go.id](http://www.infopublik.go.id)
- [www.sdgsdesa.kemendesa.go.id](http://www.sdgsdesa.kemendesa.go.id)